

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan pendorong utama bagi perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan perdagangan dapat memperluas kapasitas produksi suatu negara, meningkatkan output pendapatan global, dan menyediakan akses terhadap sumber daya yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara (Todaro & Smith, 2012). AS yang selama ini dikenal sebagai negara *superpower* tentunya sangat mengandalkan perdagangan luar negeri dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Bagi AS perdagangan dapat menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan perekonomian negaranya. Dari sekian banyak perdagangan internasional yang dilakukan oleh AS, perdagangan dengan Tiongkok merupakan perdagangan yang berkembang pesat intensitasnya, baik secara volume transaksi maupun secara jumlah komoditas yang diperdagangkan.

Hubungan dagang AS dengan Tiongkok sudah terjalin sejak lama, tepatnya pada bulan Januari 1979 kedua negara secara resmi mengumumkan hubungan diplomatiknya dan menandatangani perjanjian bilateral perdagangan pada bulan Juli 1979, serta memberlakukan MFN (*Most Favored Nations*) pada awal tahun 1980 (Morrison, 2005).<sup>1</sup> Dengan adanya perjanjian dagang diantara kedua negara, maka volume perdagangan diantara keduanya meningkat. Namun,

---

<sup>1</sup> Most Favored Nations adalah perjanjian perdagangan antara dua negara yang memuat klausul most favoured nation di mana semua pihak yang terlibat sepakat terhadap setiap konsesi perdagangan yang diberikan ke mitra dagang akan diterapkan ke pihak lain dalam perjanjian tersebut.

hubungan dagang kedua negara tersebut tidak selalu berjalan mulus, salah satunya penyebabnya adalah terjadinya defisit perdagangan dalam jumlah yang cukup besar yang dialami AS. Perdagangan yang selama ini dilakukan AS dengan Tiongkok cenderung tidak seimbang. AS hanya merasakan surplus perdagangan di periode awal 1980 atau empat tahun pertama sejak ditandatanganinya perjanjian perdagangan. Setelahnya, dari tahun 1986 AS selalu mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya.

**Tabel 1.1 Neraca Perdagangan AS terhadap Tiongkok (dalam miliar dolar)**

Year	Ekspor US	Impor US	U.S. Trade Balance
1980	3.8	1.1	2.7
1985	3.8	3.8	0.0
1990	4.8	15.2	-10.4
1995	11.7	45.5	-33.7
2000	16.1	100	-83.9
2005	41.2	243.4	-202.3
2006	53.7	287.8	-234.1
2007	62.9	321.5	-258.5
2008	69.7	337.8	-268
2009	69.5	296.4	-226.8
2010	91.9	365	-273
2011	104.1	399.4	-295.2
2012	110.5	425.6	-315.1
2013	121.7	440.4	-318.7
2014	123.7	468.5	-344.8

Year	Ekspor US	Impor US	U.S. Trade Balance
2015	115.9	483.2	-367.3
2016	115.6	462.4	-346.8
2017	130	505.2	-375.2
2018	120.3	538.5	-418.2
2019	106.5	449.1	-342.6
2020	124.5	432.7	-308.1
2021	151.4	504.9	-353.5
2022	140	499.4	-359.4

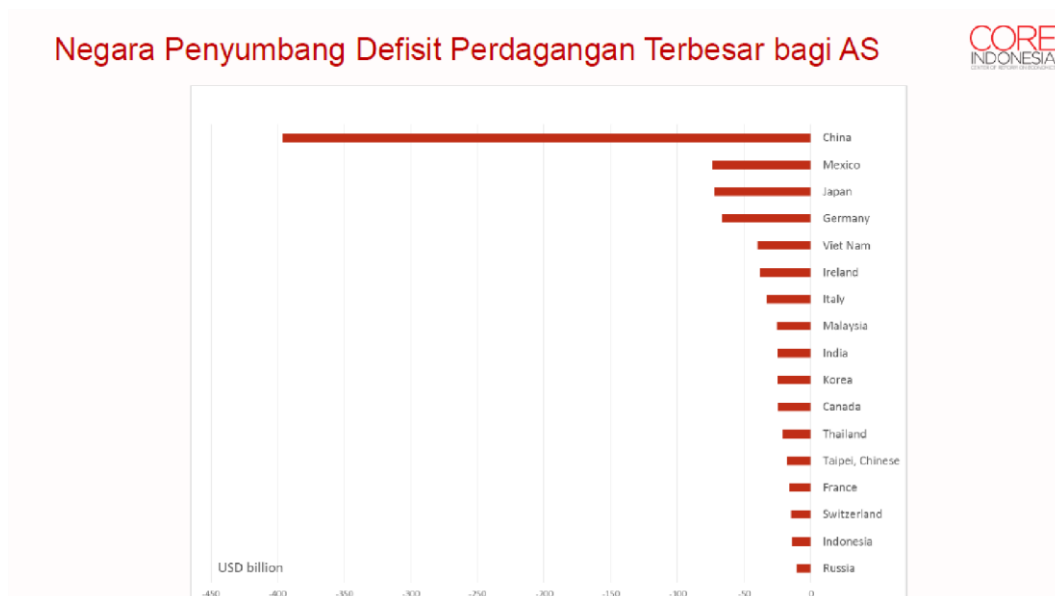
*Sumber: United States Census Bureau (Bureau, 2022).<sup>2</sup>*

Perdagangan yang seharusnya menjadi pendorong bagi perekonomian di suatu negara ternyata tidak berlaku bagi AS yang melakukan perdagangan dengan Tiongkok. Perdagangan AS dengan Tiongkok justru menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri AS sendiri, hal ini disebabkan oleh besarnya defisit perdagangan yang ditimbulkan. Berdasarkan tabel sebelumnya dapat dilihat bagaimana besarnya defisit perdagangan yang dialami oleh AS. AS mengalami defisit perdagangan dalam jumlah besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2005 defisit perdagangan AS per tahunnya mencapai angka US\$ 200 miliar dan bertambah menjadi di atas US\$ 300 miliar di tahun 2014 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang.

---

<sup>2</sup> Peningkatan volume transaksi perdagangan AS dan Tiongkok telah mengalami peningkatan drastis setelah Tiongkok bergabung menjadi anggota World Trade Organization pada tahun 2001.

**Gambar 1.1 Negara Penyumbang Defisit Perdagangan Terbesar Bagi AS**



Sumber: *Indonesia of Global Justice* (Faisal, 2018).<sup>3</sup>

Hubungan kedua negara pun mulai mengalami ketegangan, AS mulai memandang Tiongkok sebagai ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi negaranya, apalagi setelah pemerintah Tiongkok memperkenalkan agenda “*Made in China 2025*” pada bulan Mei 2015 sebagai *project* nasional mereka. Inisiatif ini diprakarsai oleh pemerintahan Xi Jinping yang berencana untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara yang kuat secara Industri. Langkah pertama yang dilakukan Tiongkok adalah dengan meningkatkan kualitas keseluruhan manufaktur, mendorong inovasi dan produktivitas tenaga kerja, memperoleh *benefit* dari integrasi teknologi informasi, mengurangi konsumsi energi dan material dengan melakukan inovasi energi terbarukan, dan mengembangkan perusahaan multinasionalnya.

<sup>3</sup> Tiongkok berkontribusi lebih dari setengah defisit perdagangan AS. Data Tahun 2018 saja menunjukkan bahwa nilai ekspor AS ke Tiongkok hanya sebesar US\$ 120,3 Milyar dan sebaliknya nilai impor AS dari Tiongkok melonjak hingga US\$ 538,5 Milyar.

**Gambar 1.2 US Trade Deficit/Surplus with Tiongkok by Product**



Sumber: *Indonesia of Global Justice* (Faisal, 2018).<sup>4</sup>

Hal inilah yang membuat Robert Lighthizer sebagai perwakilan dari Departemen Perdagangan AS sekaligus penasihat Donald Trump di bidang perdagangan, mengomentari inisiatif ini sebagai tindakan yang agresif dan tidak adil. Lighthizer mengatakan:

*“China’s government is aggressively working to undermine America’s high-tech industries and our economic leadership through unfair trade practices and industrial policies like Made in China 2025”* (Morrison, 2019)

Oleh karena itu dalam upaya memperbaiki neraca perdagangan AS, Presiden Donald Trump mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu yang menjadi kebijakan tersebut adalah meninjau kembali perjanjian-perjanjian

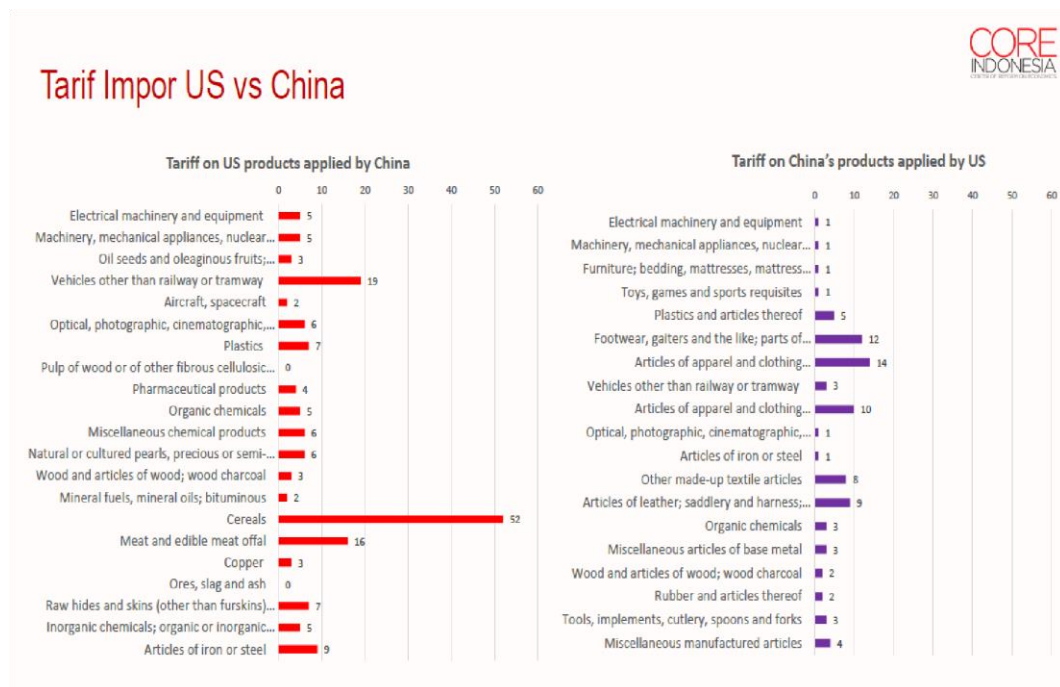
<sup>4</sup> Beberapa komoditas perdagangan utama AS yang defisit terhadap Tiongkok adalah elektronik, mesin, furniture, mainan, pakaian, besi dan baja. Sebaliknya, komoditas perdagangan AS yang surplus terhadap Tiongkok adalah komponen pesawat terbang dan produk-produk pertanian.

perdagangan AS dengan Tiongkok. AS kemudian memutuskan untuk menginisiasi kebijakan menaikkan hambatan tarif impor terhadap produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Pada tanggal 22 Maret 2018 Presiden AS, Donald Trump, merilis sebuah laporan dari *US Trade Representative (USTR)* yang menyatakan sanksi perdagangan kepada Tiongkok berupa diberlakukannya hambatan tarif impor terhadap 1.300 jenis produk yang berasal dari Tiongkok sebesar US\$ 60 miliar. Pemberlakuan hambatan tarif ini tentunya sangat berdampak negatif bagi Tiongkok. Pemasukan terbesar Tiongkok yang berasal dari kegiatan ekspor terkena dampak yang cukup parah, karena dengan adanya kenaikan hambatan tarif impor terhadap produk Tiongkok oleh AS menyebabkan berkurangnya pemasukan devisa bagi Tiongkok.

Dengan berjalannya kebijakan kenaikan hambatan tarif impor produk Tiongkok oleh AS, Tiongkok merasa perlu melakukan sebuah tindakan balasan demi melindungi kedaulatan negaranya dan kepentingan ekonominya. Tiongkok melakukan tindakan balasan untuk menjaga kepentingan ekonominya agar tidak menimbulkan masalah kedepannya. Selain itu, Tiongkok menganggap kebijakan yang dikeluarkan oleh AS tersebut merupakan sebuah bentuk ancaman, karena akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump tersebut yang menaikkan hambatan tarif impor dan membatasi produk Tiongkok untuk masuk kedalam pasar AS jumlah ekspor Tiongkok ke AS menurun drastis. Hal ini tentunya berdampak pada pemasukan devisa Tiongkok, karena penyumbang terbesar devisa Tiongkok salah satunya dari kegiatan ekspor. Maka untuk melindungi kepentingan ekonominya, pemerintah Tiongkok melakukan aksi balasan terhadap kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah AS. Melalui Presidennya yaitu Xi Jinping merespons kebijakan Presiden Donald Trump tersebut. Tiongkok pun mengumumkan hambatan tarif balasan atas produk impor AS senilai US\$ 3 miliar pada komoditas aluminium dan baja pada 23 Maret 2018 (Mullen, 2022).

**Gambar 1.3 Tarif Impor AS vs Tiongkok**



*Sumber: Indonesia of Global Justice (Faisal, 2018).<sup>5</sup>*

Tindakan saling balas hambatan tarif impor oleh kedua negara tersebut pada akhirnya menjadi peristiwa perang dagang. AS adalah pihak yang menginisiasi terjadinya perang dagang dengan secara agresif menaikkan hambatan tarif yang begitu tinggi terhadap produk yang berasal dari Tiongkok. Namun, pembalasan hambatan tarif oleh Tiongkok terhadap produk impor dari AS

<sup>5</sup> Pembebanan tarif perdagangan AS yang lebih rendah dari Tiongkok kemudian berdampak terhadap melebarnya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok. Inilah yang menyebabkan AS melalui Presidennya Donald Trump mendorong adanya negosiasi kembali dengan Tiongkok mengenai tarif impor baru produk Tiongkok yang akan masuk ke AS.

menunjukkan sikap dari pemerintah Tiongkok, bahwa langkah yang mereka ambil merupakan langkah rasional yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara mereka. Jika Tiongkok tidak memberikan pembalasan, maka Tiongkok akan mengalami kerugian yang cukup besar dengan membiarkan AS mengambil semua potensi ekonomi yang bisa dikembangkan oleh Tiongkok. Langkah pembalasan ini pada akhirnya harus dilakukan demi kepentingan nasional negaranya. Tindakan saling balas hambatan tarif impor yang dilakukan oleh kedua negara ini menimbulkan kekhawatiran bagi dunia internasional yang kemungkinan akan berdampak buruk terhadap perekonomian global. AS dan Tiongkok merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan apabila muncul ketidakstabilan ekonomi pada salah satunya, maka akan memunculkan efek domino yang begitu nyata terhadap negara-negara di dunia.

Peneliti berpendapat bahwa keberlangsungan perang dagang ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu dalam menganalisis fenomena perang dagang ini, maka diperlukan pendekatan yang relevan atau paradigma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Ekonomi Politik Internasional, teori Merkantilisme, teori *Neo-classical Realism* dan teori *Balance of Interest* karya Randall Schweller sebagai alat bantu dalam menganalisis perang dagang antara AS dengan Tiongkok.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mempunyai beberapa perumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya adalah:



- 1) Bagaimana hubungan dagang AS dengan Tiongkok sebelum terjadinya perang dagang?
- 2) Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perang dagang AS dengan Tiongkok?
- 3) Bagaimana perang dagang antara AS dengan Tiongkok jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Politik Internasional?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah agar terdapat relevansi yang cukup jelas mengenai sumber dan referensi yang akan diteliti dalam penelitian ini dan mempermudah peneliti melakukan fokus penelitian. Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada kebijakan proteksionisme ekonomi AS yang melandasi terjadinya perang dagang dengan Tiongkok dan tindakan balasan dari Tiongkok terhadap kebijakan AS tersebut.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, meneliti dan mendeskripsikan bagaimana proses perang dagang antara AS dengan Tiongkok dapat terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perumusan masalah diatas, yang tujuannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui hubungan dagang AS dengan Tiongkok sebelum terjadinya perang dagang.

- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perang dagang AS dengan Tiongkok.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana perang dagang AS dengan Tiongkok jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Politik Internasional.

#### 1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kegunaan berdasarkan manfaatnya. Kedua, kegunaan berdasarkan praktisnya.

Kegunaan berdasarkan manfaatnya adalah untuk memberikan *legacy* berupa hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti (dibantu oleh teori dan konsep paradigma dari berbagai tokoh), diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Politik terkait perang dagang AS dengan Tiongkok, sehingga bisa menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang.

Sedangkan kegunaan berdasarkan sifat praktisnya adalah sebagai prasyarat kelulusan skripsi dalam Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi sekaligus memberikan informasi kepada pembaca mengenai bagaimana fenomena perang dagang yang terjadi antara AS dengan Tiongkok secara komprehensif.